

## ANALISIS EFEKTIVITAS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA KANTOR BALAI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN WILAYAH SULAWESI

Afilya Margaret<sup>1</sup>, Marly Sarna<sup>2</sup>, Marsha<sup>3</sup>, Petrus Peleng Roreng<sup>4</sup>, Wendy Kala Tikupadang<sup>5</sup>  
[afilyamargaret@gmail.com](mailto:afilyamargaret@gmail.com)<sup>1</sup>, [marlysarna04@gmail.com](mailto:marlysarna04@gmail.com)<sup>2</sup>, [marshalpg01@gmail.com](mailto:marshalpg01@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[petrusroreng1@gmail.com](mailto:petrusroreng1@gmail.com)<sup>4</sup>, [wendytikupadang@gmail.com](mailto:wendytikupadang@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Kristen Indonesia Paulus

### ABSTRAK

Analisis Efektivitas Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Kantor Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset secara akuntabel, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya pada Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penatausahaan BMN di balai tersebut telah berjalan cukup efektif karena seluruh kegiatan pencatatan, pelaporan, dan inventarisasi telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya pembaruan data aset, serta keterlambatan dalam proses perbaikan dan penghapusan barang. Faktor pendukung efektivitas antara lain adanya sistem informasi yang terintegrasi, dukungan kebijakan internal, serta koordinasi yang baik antarunit kerja. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi pegawai dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang lebih akuntabel, efisien, dan transparan.

**Kata Kunci:** Barang Milik Negara, Penatausahaan, Efektivitas, Pembukuan, Akuntabilitas.

### ABSTRACT

*Analysis Of The Effectiveness Of State Property (BMN) Management At The Forest Fire Control Agency For The Sulawesi Region. This study aims to analyze the effectiveness of State Property (BMN) management, encompassing bookkeeping, inventory, and reporting of assets in an accountable manner, as well as to identify the supporting and inhibiting factors influencing its implementation at the Forest Fire Control Agency for the Sulawesi Region. A qualitative descriptive method was employed, with data collected through interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that the implementation of BMN management has been relatively effective, as all recording, inventory, and reporting activities comply with existing regulations. Nevertheless, challenges remain, including limited human resources, suboptimal asset data updates, and delays in asset repair and disposal processes. Supporting factors include the availability of an integrated information system, strong internal policy support, and effective inter-unit coordination. The study highlights the importance of improving employee competence and optimizing the use of information technology to enhance accountability, efficiency, and transparency in public asset management.*

**Keywords:** State Property, Administration, Effectiveness, Bookkeeping, Accountability.

### PENDAHULUAN

Pengelolaan aset negara merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Barang Milik Negara (BMN) sebagai aset negara memiliki peranan strategis dalam mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan BMN yang efektif dan efisien sangat diperlukan agar aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal serta dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik dari masyarakat kepada para pengelola negara merupakan fenomena yang terus berkembang. Kedua aspek tersebut memiliki peran krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta lembaga-lembaga negara (Sitorus et al., 2025, p. 235).

Barang Milik Negara (BMN) adalah seluruh barang yang diperoleh atau dibeli menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun berasal dari sumber perolehan sah lainnya (Wibowo et al., 2021, p. 60). BMN menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintahan secara efektif (Mustafa, 2002, p. 55). Namun demikian, pada praktiknya pengelolaan BMN di berbagai instansi pemerintah masih dihadapkan pada berbagai kendala. Data dan laporan terkait BMN sering kali tidak akurat, pembukuan tidak lengkap, serta inventarisasi aset tidak dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Kondisi ini menghambat proses pengawasan dan pertanggungjawaban atas penggunaan aset negara. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya sistem informasi manajemen aset, serta minimnya koordinasi antarunit kerja turut memperburuk efektivitas pengelolaan BMN. Akibatnya, potensi pemanfaatan aset negara secara optimal belum sepenuhnya tercapai, yang pada akhirnya dapat berdampak pada efisiensi anggaran dan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.

Kompleksitas administrasi dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan penatausahaan BMN. Pengelolaan BMN yang tidak dilaksanakan secara efektif dapat menyebabkan informasi dalam laporan keuangan pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat menjadi kurang dapat dipercaya (Garmendia & Kapur, 2013 dalam Firmansyah & Hollyson, 2021, p. 179). Kurangnya pengelolaan yang baik atas aset negara bisa menyebabkan barang hilang atau rusak tanpa tercatat. Sejak 2015, pemerintah mulai menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual untuk menyajikan data BMN yang lebih jelas dan dapat dipercaya oleh masyarakat (Firmansyah & Hollyson, 2021, p. 179). Salah satu temuan dalam penelitian terdahulu di Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sulawesi menemukan bahwa keterbatasan petugas BMN memengaruhi inventarisasi, di mana registrasi sementara tidak dilakukan menyeluruh dan langsung diganti dengan pelabelan permanen, sehingga menunjukkan adanya kendala serius di tingkat pelaksana dalam menjaga tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan BMN (Patiung, 2023).

Penelitian tentang efektivitas penatausahaan BMN sudah banyak dilakukan, namun umumnya masih bersifat umum dan belum menyentuh konteks khusus seperti lembaga pengendalian kebakaran hutan yang memiliki kompleksitas tersendiri. Kantor Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi dipilih sebagai objek penelitian karena lokasinya yang berdekatan dengan kampus penulis, sehingga mendorong pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi, masyarakat, dan instansi terkait, serta dapat digunakan sebagai referensi dalam pengawasan sosial dan pengembangan ilmu akuntansi sektor publik. Belum banyak penelitian yang secara spesifik menyoroti efektivitas penatausahaan BMN pada instansi teknis yang bersifat operasional seperti balai ini, karena sebagian besar kajian cenderung fokus pada kementerian pusat atau unit administratif besar. Oleh karena itu, terdapat research gap yang perlu diisi melalui penelitian ini, yaitu mengeksplorasi bagaimana pelaksanaan penatausahaan BMN di lingkungan instansi daerah teknis, apa kendalanya, serta bagaimana hal itu berdampak terhadap pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban publik.

Secara keilmuan, penelitian ini berakar kuat pada bidang akuntansi sektor publik. Penatausahaan BMN merupakan bagian dari sistem akuntansi pemerintahan yang melibatkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan, dan pengendalian aset milik negara. Evaluasi efektivitas penatausahaan BMN sama artinya dengan menilai apakah prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi sudah dijalankan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan regulasi yang berlaku. Penelitian ini memiliki urgensi karena tidak hanya menilai efektivitas penatausahaan BMN, tetapi juga berfokus pada identifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambatnya, sehingga hasilnya dapat memberikan rekomendasi praktis bagi Balai dan

kontribusi teoritis dalam literatur akuntansi sektor publik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penatausahaan BMN yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset secara akuntabel serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya di Kantor Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Efektivitas Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi Selatan telah melaksanakan penatausahaan BMN secara rutin, yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sesuai dengan regulasi PMK 181/2016.

Pada aspek pembukuan BMN, seluruh transaksi telah dicatat menggunakan aplikasi SAKTI, mulai dari perolehan hingga penghapusan aset. Pendaftaran dan kodifikasi BMN dilakukan sesuai ketentuan, sehingga data aset mudah dilacak dan menghindari duplikasi. Penyusunan Daftar Barang dan Buku Barang Kuasa Pengguna serta DBKP juga dilakukan lengkap dan disahkan oleh UAKPB. Namun, ditemukan beberapa barang rusak atau tidak layak pakai yang belum diusulkan untuk penghapusan, sehingga terdapat kesenjangan antara catatan administrasi dan kondisi fisik barang. Wawancara dengan pegawai, seperti Bapak Adrianus, S.P., dan Ibu Melvin Stefani Rangga, S.P., memperkuat temuan ini, dengan penekanan pada efektivitas administratif pembukuan yang cukup baik namun terbatas oleh kapasitas SDM dalam penginputan data secara tepat waktu.

Pada inventarisasi BMN, balai secara rutin melaksanakan stock opname dan sensus barang setiap tahun. Rencana inventarisasi disampaikan kepada pengelola barang, dan laporan hasil inventarisasi dikirim sesuai jadwal, mendukung pemutakhiran data. Meski begitu, beberapa aset rusak masih tercatat aktif, sehingga data administrasi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi fisik barang. Wawancara dengan Bapak Yulianus Sombo dan Ibu Melvin Stefani Rangga menegaskan bahwa inventarisasi telah berjalan sesuai prosedur, tetapi informasi kondisi barang tidak selalu diperoleh secara real-time, sehingga tindak lanjut terhadap barang rusak hanya dilakukan setelah inventarisasi tahunan.

Untuk aspek pelaporan BMN, balai menyusun laporan semesteran dan tahunan melalui aplikasi SAKTI, disampaikan ke unit atasan dan KPKNL, serta dilengkapi dokumen pendukung resmi. Sistem elektronik ini mempercepat pelaporan, namun data belum sepenuhnya mencerminkan kondisi barang di lapangan. Pegawai melaporkan bahwa meskipun laporan akuntabel secara formal, informasi jarang dibagikan kepada pengguna, sehingga partisipasi internal dalam menjaga aset masih terbatas.

#### **Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Penatausahaan BMN**

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor pendukung efektivitas penatausahaan BMN. Pertama, regulasi yang tegas dan sistem pencatatan terstandar melalui SIMAN dan integrasinya dengan SAKTI membuat pencatatan lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, inventarisasi rutin tahunan berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang memperkuat akuntabilitas. Ketiga, dukungan pimpinan dan respons kelembagaan mendorong pegawai untuk melaporkan kerusakan serta memperhatikan perbaikan atau pengadaan barang baru. Keempat, kesadaran kolektif dan partisipasi pegawai meningkatkan kepedulian terhadap pemeliharaan BMN. Kelima, ketersediaan aset dasar yang masih dapat dimanfaatkan mendukung pelaksanaan tugas operasional meskipun kondisi barang belum optimal.

Sementara itu, terdapat beberapa faktor penghambat efektivitas penatausahaan BMN. Prosedur administratif yang panjang dan kurang responsif menyebabkan barang rusak tetap tercatat sebagai aset aktif. Keterbatasan anggaran perawatan membatasi perbaikan dan

pemeliharaan aset. Jumlah SDM yang terbatas menimbulkan keterlambatan input data dan monitoring kondisi barang tidak optimal. Kurangnya transparansi pelaporan membuat pegawai pengguna jarang mengetahui isi laporan, sehingga partisipasi dalam pengawasan aset terbatas. Terakhir, kesenjangan antara data administratif dan kondisi nyata di lapangan menegaskan bahwa efektivitas penatausahaan masih lebih dominan pada aspek administratif daripada operasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi Selatan telah melaksanakan penatausahaan BMN dengan tingkat efektivitas yang baik pada dimensi administratif. Namun, efektivitas operasional dan fungsionalitas aset masih perlu ditingkatkan agar data yang tercatat tidak hanya akurat secara administratif, tetapi juga mencerminkan kondisi nyata dan kesiapan aset dalam mendukung tugas strategis pengendalian kebakaran hutan.

## **Pembahasan**

### **Pembukuan Barang Milik Negara**

Pembukuan BMN di Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi telah berjalan secara administratif sesuai ketentuan PMK 181/2016. Seluruh transaksi, mulai dari perolehan, pemindahan, hingga penghapusan aset, dicatat menggunakan aplikasi SAKTI dan SIMAN, sehingga data pembukuan tersusun tertib dan terstruktur. Efektivitas pembukuan terlihat dari keteraturan pencatatan, kodefikasi barang, serta penyusunan daftar barang yang memudahkan pelacakan dan audit. Efektivitas dipakai sebagai ukuran untuk menilai sejauh mana pelaksanaan suatu rencana atau kegiatan sesuai dengan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah sebuah program atau kegiatan berjalan secara efektif, diperlukan pengukuran terhadap tingkat efektivitasnya (Razak & Nasution, 2022, p. 41)

Meski demikian, efektivitas operasional masih terbatas. Hasil wawancara menunjukkan adanya keterlambatan input data akibat keterbatasan SDM, serta beberapa barang yang sudah menurun kualitasnya tetap tercatat dalam kondisi baik. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara administrasi formal dan kondisi riil barang, yang perlu menjadi perhatian agar pembukuan tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga mencerminkan kelayakan penggunaan aset di lapangan.

### **Inventarisasi Barang Milik Negara**

Kegiatan inventarisasi dilaksanakan dengan mencatat dan mendaftarkan Barang Milik Negara ke dalam daftar barang pengguna, sesuai dengan klasifikasi dan kodefikasi yang berlaku (Kuswara et al., 2022, p. 46). Inventarisasi di balai dilakukan secara rutin setiap tahun dengan tujuan memastikan keberadaan dan kondisi fisik BMN. Proses ini membantu memperbarui data barang, mencegah potensi kehilangan aset, dan menjadi mekanisme kontrol internal. Temuan menunjukkan bahwa meskipun inventarisasi tertib, terdapat keterlambatan pembaruan data, terutama untuk barang rusak atau yang berpindah lokasi. Akibatnya, kondisi riil barang tidak selalu tercermin secara tepat di sistem.

Efektivitas inventarisasi terlihat pada kepatuhan administratif dan pengawasan rutin, namun masih perlu diperkuat untuk mendekatkan data administrasi dengan kondisi fisik. Hal ini penting agar inventarisasi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih efektif terkait perawatan, penghapusan, atau pengadaan BMN baru.

### **Pelaporan Barang Milik Negara**

Pelaporan BMN dilakukan secara rutin, periodik, dan sesuai ketentuan PMK 181/2016, menggunakan aplikasi SAKTI yang terintegrasi dengan SIMAN. Melalui penerapan aplikasi SIMAK-BMN, data aset dapat disajikan secara real time dan memudahkan proses pelaporan antarinstansi pemerintah, sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan dan meningkatkan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan negara (Yanto & Muammar, 2021). Laporan seperti Daftar Barang Pengguna (DBP) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) disusun tiap akhir tahun, mendukung rekonsiliasi dan audit internal. Pelaporan

administrasi berjalan baik, tetapi efektivitasnya di lapangan masih terbatas karena informasi jarang disosialisasikan ke pegawai pengguna.

Temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaporan administratif dan partisipasi pegawai dalam menjaga BMN. Transparansi internal yang terbatas membuat laporan lebih dipersepsikan sebagai kewajiban formal, sehingga pemanfaatan laporan sebagai alat kontrol internal dan pengambilan keputusan strategis belum maksimal.

#### **Faktor Pendukung Efektivitas Penatausahaan BMN**

Beberapa faktor mendukung efektivitas penatausahaan BMN di Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi Selatan:

- a. Regulasi yang jelas dan sistem pencatatan yang terstandar menjamin keteraturan, akuntabilitas, dan integritas data BMN.
- b. Pelaksanaan inventarisasi rutin menjadi mekanisme kontrol yang memperkuat akuntabilitas dan membangun disiplin pegawai.
- c. Dukungan pimpinan dan respons kelembagaan mendorong pelaporan cepat dan penanganan perbaikan atau pengadaan barang.
- d. Kesadaran kolektif dan partisipasi pegawai meningkatkan kepedulian terhadap pemeliharaan BMN.
- e. Ketersediaan aset dasar yang masih dapat dimanfaatkan mendukung operasional meskipun kondisi sebagian barang menurun.

Faktor-faktor ini memastikan sistem penatausahaan tetap berjalan efektif pada aspek administratif, meskipun masih terdapat keterbatasan pada aspek operasional.

#### **Faktor Penghambat Efektivitas Penatausahaan BMN**

Beberapa faktor penghambat yang ditemukan meliputi:

- a. Keterbatasan jumlah dan kelayakan aset, yang membuat barang vital sering tidak optimal digunakan meski tercatat baik secara administratif.
- b. Prosedur administratif yang panjang dan kurang responsif, menyebabkan penanganan perbaikan atau penghapusan aset lambat.
- c. Keterbatasan anggaran perawatan, sehingga balai masih mengandalkan aset lama yang menurun kualitasnya.
- d. Keterbatasan SDM, menyebabkan keterlambatan input data dan monitoring kondisi barang kurang optimal.
- e. Kurangnya transparansi pelaporan, sehingga pegawai pengguna tidak sepenuhnya terlibat dalam pengawasan aset.
- f. Sistem pelaporan kerusakan yang manual memperlambat tindak lanjut perbaikan atau penghapusan BMN.
- g. Kesenjangan antara data administratif dan kondisi lapangan, menimbulkan ketidaksesuaian antara catatan dan pemanfaatan barang.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menekankan bahwa efektivitas penatausahaan BMN di balai ini lebih dominan pada aspek administratif. Untuk mencapai efektivitas penuh, diperlukan perbaikan pada pengelolaan aset yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kondisi nyata barang di lapangan.

#### **KESIMPULAN**

Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi Selatan secara umum telah berjalan efektif sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016. Efektivitas tersebut terlihat pada tahap pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang dilaksanakan secara sistematis melalui aplikasi SIMAN dan SAKTI. Ketiga tahap ini telah mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset, meskipun masih berfokus pada aspek administratif dan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil aset di lapangan.

Namun demikian, efektivitas penatausahaan masih dipengaruhi oleh sejumlah hambatan seperti keterbatasan aset, anggaran perawatan, serta jumlah sumber daya manusia. Prosedur administrasi yang panjang dan kurangnya transparansi pelaporan juga menghambat optimalisasi pengelolaan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas data, percepatan proses birokrasi, dan pemanfaatan laporan sebagai dasar evaluasi strategis diperlukan agar tata kelola BMN dapat menjadi lebih akuntabel dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Farhana. (2023). Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan. Univeristas Hasanuddin.
- Firmansyah, A., & Hollyson, R. (2021). Sistem informasi, kompetensi pegawai, komitmen organisasi: Bagaimana kualitas pengelolaan barang milik negara di Indonesia. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 6(2), 177–193.
- Hutasoit, Y. C. (2022). Tinjauan Penatusahaan Barang Milik Negara (BMN) Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (KANWIL DJP) Kepulauan Riau Tahun 2021. Politektik Keuangan Negara STAN Tangerang Selatan.
- Kuswarak, Nuzleha, & Zulfikar, I. (2022). Kuswarak, Kuswarak, Nuzleha Nuzleha, and Iwan Zulfikar. "Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Kantor Satuan Kerja Pelaksana Jaringan Sumber Air Mesuji Sekampung Dilampung. *JMMS: Jurnal Manajemen Mandiri Saburai*, 6(1), 45–56.
- Lubis, E. A. (2023). Efektivitas Tata Kelola Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Kementerian Agama. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 1(3), 137–160.
- Mustafa, B. (2002). Pengantar Hukum Administrasi Logistik. PT. Citra Aditya Bakti.
- Patiung, S. R. (2023). Analisis Penatausahaan Aset BMN (Barang Milik Negara) pada Kantor Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sulawesi. Universitas Kristen Indonesia Paulus.
- Razak, N., & Nasution, J. (2022). Analisis Efektivitas Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Aplikasi SIMAK-BMN. *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)*, 3(2), 39–41.
- Saputri, N. F. (2021). Efektivitas Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pada Kantor Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Setiyowati, N. (2023). Efektivitas Monitoring Penggunaan Barang Milik Negara Oleh KANWIL DJKN KALSELTENG (Studi Tanah Negara Lingkup KEMENKEU) Di Kota Banjarmasin. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- Sitorus, L., Sitompul, S. A., Kamila, N. F., & Pangestoeti, W. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Economic Reviews Journal*, 4(1), 235–244.
- Wibowo, R. A., Simamora, Y. S., Anisah, S., Putri, Karina, D. N., Kurniawan, F., Haryati, D., Amalia, R., Azzuhri, A. A., Perdana, R., Setiawan, A., Doloksaribu, S. T., Suparjo, N., Aisyah, S., & Nugraha, X. (2021). *Kontrak Pemerintah: Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi, dan Kajian Putusan* (A. W. Richo (ed.); 1st ed.).
- Yanto, F., & Muammar, S. (2021). Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak Bmn) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Negara Pada Badan Narkotika Nasional (Bnn) Provinsi Aceh Bireuen. *Jurnal Kebangsaan*, 10(19), 22–26.